

***FLYPAPER EFFECT* PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH  
PADA PEMERINTAH**

( Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung )



**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Disusun oleh:

**WIDI ANGGA KURNIAWAN**  
**NIM : B 200 110 299**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2016**

## HALAMAN PERSETUJUAN

***FLYPAPER EFFECT* PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH  
PADA PEMERINTAH  
( Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung )**

### PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

**WIDI ANGGA KURNIAWAN**  
**NIM : B 200 110 299**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



**(Drs. Suyatmim Waskito Adi, M.Si)**

## HALAMAN PENGESAHAN

### **FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH**

(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung)

Yang ditulis oleh:

**WIDI ANGGA KURNIAWAN**  
**B 200 110 299**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu, 22 Oktober 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Suyatmin Waskito Adi, Drs, Msi.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Erma Setiawati, Dr, Dra, Ak., MM.  
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Yuli Tri Cahyo, Drs, Ak, MM  
(Anggota 2 Dewan Penguji)

()

()

()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Dr. Triyono, S.E, M.Si.**

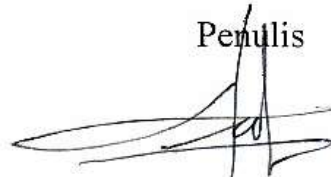
## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Surakarta, 03 November 2016

Penulis



**WIDI ANGGA KURNIAWAAN**  
**B100120341**

***FLYPAPER EFFECT* PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH  
PADA PEMERINTAH**

( Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung )

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah dalam Pemerintah Provinsi Lampung. Variabel independen yang digunakan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah Belanja Daerah (BD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris apakah DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Populasi dalam penelitian ini adalah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam periode 2011-2013, dengan jumlah sampel 14 kabupaten/kota. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Data diperoleh melalui situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)). Data yang di analisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam periode 3 (tiga) tahun antara 2011-2013 dapat diketahui bahwa. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Variabel Dana Alokasi Umum lebih berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Membuktikan adanya *flypaper effect* dalam respon pemerintah daerah terhadap DAU dan PAD. Flypaper effect sama-sama terjadi pada daerah yang memiliki PAD rendah dan dengan PAD yang tinggi.

**Kata kunci :** belanja daerah, dana alokasi umum, *flypaper effect*, pendapatan asli daerah

**ABSTRACT**

This study aims to to investigate the possibility of flypaper effect on regional spending in government lampung provincial. The independent variable used is General Allocation Fund (DAU) and Local Revenue (PAD) and that which is dependent variable is Regionall Expenditure (BD). The purpose of this research is to give evidence empirical whether General Allocation Fund and the Local Revenue of its effect on regional expenditure of districts in Lampung Provincial

Population in this research is the districts / cities in the lampung provincial in the period starting from 2011-2013 , whit amount sample 14 districts. This research was using a purposive sampling method. The data which is analyzed in

this research are collected through the region budget of Revenue and Expenditure (APBD). The analytical tool used is multiple linear regression analysis.

Based on the results of tests carried out in the period 3 (three years) between starting from 2011-2013 it can be seen that. General allocation Funds and the local revenue in together having influence a significant impact on regional spending. Variable general allocation funds more influential in significant impact on regional spending compared with local revenue. Prove the flypaper effect in response local government to DAU and PAD. Flypaper effect equally happened to the areas having local revenue low and with local revenue high.

**Keyword** : flypaper effect, general allocation fund, local revenue, regional expenditure

## 1. PENDAHULUAN

Implementasi desentralisasi menandai proses demokratisasi di daerah mulai berlangsung. Setidaknya hal tersebut diindikasikan dengan terbentuknya pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola pembangunan di daerah, tanpa dihalangi oleh kendala struktural yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri masyarakat di daerahnya lebih dikenal dengan sebutan Otonomi Daerah. Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dilakukan agar kesejahteraan yang didapat oleh seluruh masyarakatnya dapat merata atau tidak hanya sebagian orang saja yang merasakan kesejahteraan

Dalam UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), lain – lain pendapatan yang sah dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan

penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel.

Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja pemerintahan Daerah di Pulau Jawa-Bali pernah diteliti sebelumnya dan menghasilkan analisis bahwa ketika digunakan dengan *lag*, pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah justru lebih kuat dari pada PAD (Sukriy dan Halim, 2014). Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian replikasi dengan mengambil sampel yang berbeda dari yang terdahulu. Sampel yang akan digunakan adalah sampel yang berada diluar pulau Jawa, yaitu Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung Pada Tahun 2011-2013.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari laporan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yaitu data yang berupa data pendapatan asli Daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan total belanja Daerah yang diperoleh dari situs departemen keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah. Populasi dan sampel dalam penelitian adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisa regresi berganda dengan pengujian hipotesis.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 HASIL

**Tabel Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU (Rp)	42	258.173,32	1.086.335,28	539.087,7171	198.280,50500
PAD (Rp)	42	2.450,00	374.096,36	39.731,3619	65.467,62689
BELANJA DAERAH (Rp)	42	407.679,91	1.746.857,65	854.319,3733	334.243,00674

*Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016*

Tabel di atas diketahui dalam tiga tahun ini DAU dalam menunjukkan DAU terkecil (Minimum) adalah Rp 258.173,32 yang merupakan DAU pada Kabupaten Mesuji tahun 2011, yaitu periode awal pengamatan penelitian ini. DAU terbesar (Maximum) adalah Rp1.086.335,28 yang merupakan DAU Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2013, yaitu periode akhir pengamatan penelitian. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari awal pengamatan hingga akhir tahun pengamatan sebesar 34,23%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dapat mengendalikan dana transfer dari pemerintah pusat serta memaksimalkannya untuk dapat meningkatkan pendapatan daerahnya. nilai PAD terkecil (Minimum) adalah Rp 2.450,00 yang merupakan PAD Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2011, yaitu periode awal pengamatan penelitian ini. PAD terbesar (Maximum) adalah Rp 374.096,36 yang merupakan PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2013, yaitu pada periode akhir pengamatan penelitian. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari awal hingga akhir tahun pengamatan sebesar 107,56%. Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung juga mengalami peningkatan selama 2011-2013. Belanja Daerah dalam tiga tahun ini menunjukkan Belanja Daerah terkecil (Minimum) adalah Rp 407.679,91 yang merupakan Belanja Daerah pada Kabupaten Mesuji tahun 2011, yaitu periode awal pengamatan penelitian ini. Belanja Daerah terbesar (Maximum) adalah Rp 1.746.857,65 yang merupakan Belanja Daerah pada Kota Bandar Lampung tahun



2013, yaitu periode akhir pengamatan penelitian. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari awal hingga akhir tahun pengamatan sebesar 32,72%.

**Tabel Hasil Analisis Regresi Berganda**

Variabel	<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig	Keterangan
	<b>B</b>			
Konstanta	38231.142			
DAU	1.416	31.648	0.000	Berpengaruh
PAD	1.329	9.809	0.000	Berpengaruh
$R^2$	= 0,979		F hit = 891,156	
<i>Adjusted R<sup>2</sup></i>	= 0,977		F tab = 3,24	
t table	= 2,023			

*Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2016*

Nilai konstanta sebesar 38.231,142 artinya apabila nilai PAD dan DAU bernilai nol, maka Belanja Daerah meningkat sebesar 38.231,142.

Variabel DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dengan nilai koefisien 1,416. Ini dapat diartikan setiap pertambahan 1% DAU maka akan menaikkan Belanja Daerah sebesar 1,416%.

Variabel PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dengan nilai koefisien 1,329; artinya setiap pertambahan 1% PAD maka akan menaikkan Belanja Daerah sebesar 1,329%.

### **3.2 PEMBAHASAN**

#### **3.2.1 Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum memiliki nilai t hitung sebesar  $31,648 > t \text{ tabel } (2,023)$  dengan tingkat signifikan sebesar  $(0,000) < \alpha (0,05)$ . Sehingga variabel dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Sedangkan hasil uji t untuk variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai t hitung sebesar  $9,809 > t \text{ tabel } (2,023)$  dengan tingkat signifikan sebesar  $(0,000) < \alpha (0,05)$ . Sehingga variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Selain itu didukung dari hasil

analisis uji F diperoleh F hitung sebesar  $891,156 > F \text{ tabel } (3,24)$  dengan signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini dapat diartikan bahwa secara simultan DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah. Berdasarkan uji koefisien determinasi nilai *adjusted R square* adalah 0,977. Artinya 97,7% variasi Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variasi PAD dan DAU. Hasil ini menunjukkan hasil yang sangat besar, yang berarti nilai sisanya yaitu 2,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hal ini berarti PAD dan DAU memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Belanja Daerah, terlihat dari nilai *adjusted R square* yang mendekati angka 1. Semakin besar PAD dan DAU maka Belanja Daerah akan semakin besar pula. Dengan demikian hipotesis alternatif pertama yaitu PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dapat diterima.

### **3.2.2 Identifikasi Terjadinya *Flypaper Effect* terhadap Belanja Daerah oleh DAU dan PAD**

*Flypaper Effect* dapat dikatakan sebagai suatu kondisi dimana dorongan suatu pengeluaran atau belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah meningkat lebih besar karena disebabkan oleh perubahan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dibandingkan dengan perubahan yang disebabkan oleh pendapatan asli daerahnya sendiri. Dampak dari terjadinya *Flypaper Effect* biasanya bersifat negatif karena ini Menyebutkan adanya ketidak mandirian yang terjadi pada suatu daerah, maksud dari ketidak mandirian disini adalah pemerintah daerah lebih bergantung atau lebih mengharapkan bantuan transfer dari pemerintah pusat untuk melakukan belanja atau pengeluaran daerah dibandingkan dengan menggunakan pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri yang biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **3.2.3 Perbedaan *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota yang PAD-nya tinggi dengan Kabupaten/Kota yang PAD-nya rendah**

Hipotesis alternatif ketiga menyatakan bahwa "Daerah dengan PAD rendah dan PAD tinggi mengalami *flypaper effect*". Dengan

terjadinya *flypaper effect*, yang telah dibuktikan pada hipotesis alternatif kedua yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah lebih banyak menggunakan DAU daripada PAD untuk Belanja Daerah. Hal ini berarti bahwa terjadi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ketergantungan ini dinyatakan dalam rasio ketergantungan keuangan daerah. Semakin besar rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin besar terjadinya *flypaper effect*. Hal ini berbanding terbalik dengan besarnya PAD. Semakin tinggi PAD suatu daerah maka kemampuan untuk membiayai belanja daerah semakin besar dan rasio ketergantungan keuangan daerah semakin kecil dan *flypaper effect* juga menurun. Sebaliknya, semakin rendah PAD suatu daerah maka kemampuan untuk membiayai belanja daerah semakin kecil dan rasio ketergantungan keuangan daerah semakin besar dan *flypaper effect* juga meningkat.

Berdasarkan hasil analisis uji independent t diketahui bahwa Hal rata-rata (mean) keduanya baik antara daerah dengan PAD tinggi maupun rendah sama-sama terjadi *flypaper effect*, karena hasil analisis diketahui tidak adanya perberbedaan antara daerah dengan PAD tinggi maupun rendah sama-sama terjadi *flypaper effect*.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan:

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, terbukti dari nilai thitung masing-masing  $> t_{\text{tabel}} (2,023)$  dengan signifikansi (p value)  $< 0,05$ , sehingga  $H_{a1}$  diterima.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh lebih besar terhadap belanja daerah, hal ini menunjukkan bahwa terjadi *flypaper effect* terhadap belanja daerah oleh DAU dan PAD atau adanya transfer dari pusat menyebabkan belanja daerah menjadi lebih besar sehingga  $H_{a2}$  diterima.

Daerah dengan PAD rendah dan PAD tinggi mengalami *flypaper effect*, hal itu terbukti dari nilai signifikansi ( $p \text{ value} = 0,102$ )  $> 0,05$ , sehingga  $H_0$  diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan telah terjadinya *flypaper effect* dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana pembiayaan dalam APBD lebih bergantung pada penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lain-lain yang dianggap sah. Karena pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan dengan kemandirian yang harus dapat diwujudkan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, maka disarankan kepada pemerintah pusat agar ; (1) menerapkan kebijakan pemberian bantuan yang diarahkan pada kebutuhan daerah setempat, (2) mengurangi tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat melalui kebijakan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam, 2011. "*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Cetakan IV*", Badan penerbit Universitas Dipnegoro, Semarang.
- Mahmudi, 2010, Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Sukriy, A., & Halim, Abdul. (2004). "Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah studi kasus kabupaten/kota di Jawa dan Bali". Yogyakarta: Jurnal ekonomi, No.2/Th. XIII/25/, 90-109
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Rahman, Arief dan Diah Ayu Kusumadewi. 2007, Jurnal Ilmiah "Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia", JAAI Vol 11 No 1
- Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul, 2004. "Pengaruh Dana Alokasi Umum

(DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah :  
Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali”, Proceeding Simposium  
Nasional Akuntansi VI, 16-17 Oktober 2003, Surabaya

Turnbull, G.K. 1998. “ The Overspending and Flypaper Effect of Fiscal Illusion:  
theory and Empirical Evidence”, Journal of Urban Economics, 44(1),  
Juli: 1-26..